

## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dimaksud disini adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain yang mendekati dengan tema penelitian ini, yaitu penelitian yang tentang konflik nelayan. Berikut adalah beberapa penelitian tentang konflik nelayan.

1. Rumponisasi, konflik nelayan dan kelestarian sumber daya ikan. Oleh Suhana (2008).

Penelitiannya tersebut melihat bahwa apabila rumpon tersebut tidak diatur dengan sistem kelembagaan yang kuat maka akan dikhawatirkan program rumponisasi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti konflik horizontal antara nelayan pengguna rumpon dengan yang tidak menggunakan rumpon, seperti yang terjadi di sekitar perairan Teluk Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat yang menunjukkan bahwa di perairan tersebut terjadi konflik antara nelayan payang dengan nelayan rumpon. Dampak yang kedua adalah terancamnya populasi ikan Tuna, hal ini disebabkan ikan Tuna yang ditangkap disekitar areal rumpon adalah baby tuna dengan ukuran 3-10 kg. Padahal idealnya tuna yang layak ditangkap adalah yang berukuran 20-60 kg. Berdasarkan kedua permasalahan tersebut dapat dicegah dengan melakukan beberapa langkah terkait dengan penguatan sistem kelembagaan pengelolaan rumpon di perairan Indonesia.

Dalam studi tersebut terlihat bahwa program rumponisasi yang digalakkan oleh pemerintah jika tidak dilakukan dengan sistem penguatan kelembagaan maka akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah tersebut adalah timbulnya konflik nelayan nelayan. Hal ini seperti yang terjadi di komunitas nelayan Puger. program rumponisasi ternyata dapat memicu konflik diantara nelayan. Dalam studi tersebut, penggambaran tentang bagaimana tindakan kolektif nelayan yang berkonflik belum terlihat dengan baik. Oleh karena itu tesis ini lebih memfokuskan bagaimana tindakan kolektif yang dilakukan nelayan terutama nelayan yang tidak menggunakan rumpon dalam alat tangkapnya. Disamping itu studi yang dilakukan oleh Suhana juga membantu peneliti dalam pemahaman bagaimana program rumponisasi yang berkembang di perairan Indonesia.

2. Konflik-konflik sumberdaya alam di kalangan nelayan di Indonesia.

Oleh Rilus A Kinseng.

Masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah masalah kelas dan konflik kelas, kasus di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kesimpulannya bahwa struktur kelas kaum nelayan di Balikpapan tidak berkembang kearah yang lebih sederhana, yakni kelas buruh dan kelas kapitalis, tetapi sebaliknya berkembang dari kelas yang sederhana yakni pemilik dan buruh menjadi semakin rumit dengan munculnya kelas menengah baru. Kaum buruh nelayan Sawi di Balikpapan masih belum mempunyai kesadaran kelas. Nelayan kelas pemilik secara keseluruhan di Balikpapan telah mulai mempunyai kesadaran kelas dan formasi kelas nelayan pemilik sudah mulai terjadi (Kinseng, 2009).

Dalam studi tersebut membantu peneliti dalam penguatan mengenai gambaran konflik yang terjadi diantara nelayan. Terutama dalam hal tentang jenis alat tangkap atau unit penangkapan oleh nelayan yang menimbulkan konflik diantara nelayan. Dimana masing-masing kelas tersebut saling beraliansi untuk kemudian berkonflik. Studi yang dilakukan Rilus A. Kinseng memberikan kegunaan kepada peneliti bahwa unit penangkapan dan /atau jenis alat tangkap yang digunakan nelayan merupakan hal yang penting dalam konflik nelayan. Akan tetapi dalam tesis ini alat tangkap bukanlah hal utama dalam terjadinya konflik, namun juga penggunaan alat bantu penangkapan yaitu rumpon ternyata juga berkontribusi untuk memicu konflik diantara nelayan pemerintah setempat.

3. Konflik kenelayanan di kepulauan Spermonde: analisis terhadap peristiwa konflik antar nelayan. Oleh Moh. Jufri (2006)

Konflik antar nelayan adalah salah satu fonemena konflik yang marak terjadi dalam kurun lima tahun terakhir. Terkait dengan konflik nelayan, identitas nelayan yang berkonflik sering dikategorikan berdasarkan alat atau teknologi yang digunakan. Padahal, konflik kenelayanan bisa saja terjadi antar nelayan yang memiliki alat sama. Meskipun benar kesenjangan atau perbedaan teknologi telah memicu konflik, tetapi isu identitas sosial, dalam hal ini etnisitas dan asal daerah nelayan menjadi sangat penting untuk diperhitungkan dalam memahami konflik kenelayanan. Olehnya itu, faktor lain perlu dipertimbangkan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan di atas.

Pertanyaan-pertanyaan pokok diajukan, meliputi (1) peristiwa konflik kenelayanan apa saja yang telah terjadi, (2) bagaimana tipologi konfliknya, (3) bagaimana faktor identitas sosial (identitas asal kampung dan etnisitas) dalam mempengaruhi terjadinya konflik, serta (4) bagaimana nelayan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif di wilayah Kepulauan Spermonde. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa : pertama, peristiwa konflik yang terjadi di lokasi penelitian, umumnya dilatarbelakangi oleh tiga aspek yaitu : (a) alat tangkap, (b) pelanggaran aturan wilayah penangkapan, dan (c) dampak penegakan hukum. Kedua, tipologi konflik kenelayanan di Kepulauan Spermonde didominasi oleh : (a) konflik internal "perang alat tangkap", (b) konflik eksternal "nelayan tangkap vs pembudidayan", (c) konflik yurisdiksi perikanan "*open acces* vs '*common property*' berbasis masyarakat" dan (d) konflik mekanisme pengelolaan, terkait penegakan yang "eksesif (berlebihan) vs ringan".

Ketiga, pengaruh identitas sosial, (a) asal daerah nelayan terlihat dari aturan pelarangan yang dibuat nelayan lokal terhadap nelayan pendatang atas perbedaan asal daerah nelayan "desa" dan "kabupaten". Sedangkan (b) pengaruh etnisitas terkait dengan adanya perbedaan budaya, sifat dan karakter dalam proses penangkapan nelayan pendatang (Mandar, Madura, Galesong), yang dianggap mengkhawatirkan oleh nelayan lokal. Keempat, usaha penyelesaian konflik kenelayanan di Kepulauan Spermonde telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai pendekatan. Baik melalui pendekatan aparat hukum, pemerintah lokal, tokoh-tokoh nelayan, dan hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, usaha penyelesaian konflik terkendala oleh berbagai hal seperti: penegakan hukum yang tidak konsisten, masih kurangnya aturan-aturan antar pengguna sumber daya, kurangnya alternatif mata pencaharian dan permodalan, serta lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka penyelesaian konflik kenelayanan di Kepulauan Spermonde, nelayan mengusulkan perlunya penegakan hukum yang konsisten, bantuan permodalan, pembangunan usaha alternatif mata pencaharian, aturan-aturan baik di lokasi penangkapan maupun aturan antar nelayan lokal dan pendatang.

Dalam studi yang dilakukan Jufri pada komunitas nelayan yang ada di kepulauan Spermonde, terlihat bahwa alat atangkap, pelanggaran aturan wilayah penangkapan, dampak penegakan hukum serta masalah yurisdiksi perikanan yang *open acces*

merupakan aspek yang utama dalam konflik masyarakat nelayan. Dalam studi yang dilakukan oleh peneliti juga terkait dengan alat tangkap, wilayah penangkapan serta masalah kepemilikan laut yang *open acces*. Studi yang dilakukan Jufri hanya melihat alat tangkap saja yang menyebabkan konflik sedangkan dalam tesis ini aspek alat bantu penangkapan juga dapat memicu konflik selain masalah kepemilikan laut yang masih *open acces*. Selain itu studi Jufri ini membantu peneliti dalam melihat bagaimana aspek identitas sosial ini bekerja dalam konflik nelayan.

4. Nilai prilaku dan motivasi nelayan tradisional Siantan (studi kasus konflik nelayan Siantan dengan awak kapal Thailand) oleh Ruslan (2004)

Penelitian ini berangkat dari persoalan yang terjadi pada masyarakat nelayan Siantan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sejak tahun 1988 sampai tahun 2003 mengalami ketegangan dengan kapal-kapal nelayan Thailand yang masuk di wilayah perairan mereka. Ketegangan-ketegangan tersebut akhirnya menjadi konflik yang berkepanjangan, Sebagaimana diketahui bahwa daerah ini terdapat banyak pulau dan teluk serta berdekatan dengan laut Cina Selatan yang merupakan salah satu laut terdalam di dunia. Konflik berkepanjangan ini menimbulkan implikasi kekerasan yang dilakukan nelayan tradisional Siantan terhadap kapal Thailand.

Dengan berbagai aksi, baik itu dalam bentuk pembakaran kapal, penutupan kantor-kantor kapal Thailand, aksi-aksi unjuk rasa pada pemerintahan sipil dan militer (angkatan laut). Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini terfokus pada konflik yang terjadi antara nelayan tradisional Siantan, dengan kapal-kapal nelayan Thailand yang hadir dan menangkap ikan di wilayah mereka. Kajian ini diuraikan dengan mengkaji bagaimana nilai-nilai prilaku yang terdapat dalam masyarakat nelayan Siantan, dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Termasuk nilai-nilai apa yang masih berlaku dan telah berubah dalam kehidupan sosial masyarakat nelayan Siantan. Selain itu, motivasi apa yang melatar belakangi nelayan Siantan melakukan perlawanan terhadap awak kapal Thailand dalam berbagai bentuk aksi dan penentangan. Dan apakah motivasi-motivasi yang dimiliki oleh para nelayan itu kemudian menjadi salah satu pemicu munculnya prilaku keras yang diekspresikan dalam bentuk pembakaran kapal dan tindakan kekerasan lainnya. Juga bagaimana para nelayan melihat tindakan dan perilaku

yang mereka ekspresikan dalam konflik ini berdasarkan pandangan mereka sendiri. Dan apa yang menjadi tuntutan mereka dalam konflik yang terjadi ini.

Dalam studi yang dilakukan oleh Ruslan tentang perilaku dan motivasi yang dilakukan oleh kelompok nelayan tradisional Siantan terhadap nelayan luar dengan berbagai aksi yang dilakukan, memberikan kegunaan kepada tesis ini tentang gambaran aksi nelayan dalam melakukan perlawanan. Namun dalam tesis ini perlawanan atau aksi yang dilakukan terjadi oleh nelayan non rumpon kepada *lokal state* (dinas perikanan dan peternakan Jember) yang terkait dengan kebijakan aturan pemasangan dan pemanfaatan rumpon. Oleh karena itu penelitian ini dapat memberikan gambaran yang berbeda tentang bagaimana aksi yang dilakukan nelayan terhadap pemerintahan lokal.

5. Anatomi Konflik dan Solidaritas masyarakat Nelayan di Sakates,  
Oleh Sabian Utsman (2007)

Konflik yang terjadi adalah antara nelayan lokal dan nelayan daerah luar. Dalam konflik tersebut terjadi perlawanan kolektif dari premitif mengarah kepada reaksioner untuk mempertahankan daerah "*food security*" bagi mereka. Solidaritas yang terjadi antara tahun 1998-2002 adalah solidaritas dengan dasar ikatan primordialisme, mereka mampu membangun solidaritas yang melampaui pemikiran yang sewajarnya dalam konsepsi tradisional setempat. Dalam hal penanganan konflik, sesuai fakta pola-pola yang menyebabkan kejengkelan kekecewaan nelayan lokal selama tidak kurang 23 tahun (1975-1998) paling tidak pihak-pihak yang berkompetisi tidak sedini mungkin mengolah konflik dengan baik, secara jelas tidak mampunya negara mengimplementasikan perundangan yang sudah diundangkan (kepres. No. 39/1980). Saran yang ditawarkan adalah dengan mengutamakan pertimbangan sosiologis dalam menegakkan supremasi hukum, yaitu dalam peraturan perundangannya, aparat penegak hukumnya dan kultur hukum masyarakatnya.

Dalam studi yang dilakukan oleh Sabian Utsman terlihat adanya konflik antara nelayan lokal dengan nelayan daerah luar. Utsman lebih menitikberatkan pada bagaimana bentuk dasar ikatan solidaritas dari perlawanan yang dilakukan oleh nelayan lokal. Solidaritas primordialisme merupakan unsur utama dalam perlawanan tersebut. Hal ini membantu peneliti dalam memberikan gambaran mengenai bagaimana solidaritas dari

perlawanan nelayan. Ikatan solidaritas primordialisme bukanlah satu-satunya ikatan yang ada dalam nelayan untuk kemudian melakukan perlawanan. Tidak menutup kemungkinan adanya hal lain yang lebih kuat atau melebihi ikatan primordialisme. Konflik rumpon yang ada di komunitas nelayan Puger ikatan solidaritas untuk melakukan aksi atau perlawanan bisa juga didukung oleh ikatan solidaritas primordialisme atau mungkin dibentuk oleh ikatan solidaritas yang lain. Oleh karena itu dalam tesis ini ikatan solidaritas yang lain itu juga diidentifikasi sebagai upaya untuk melihat secara menyeluruh bagaimana aksi kolektif itu dilakukan.

Studi-studi tentang berbagai konflik nelayan yang terjadi tersebut secara umum memberikan gambaran tentang bagaimana konflik-konflik kenelayan terjadi. Studi tentang konflik yang disebabkan oleh alat tangkap dan armada yang digunakan nelayan merupakan aspek yang paling dominan dalam komunitas nelayan. Selain itu aspek ikatan solidaritas sosial juga mewarnai konflik kenelayan. Kondisi perairan Indonesia yang masih menganut *open acces* juga berperan dalam konflik kenelayan. Selain hal yang telah diuraikan di terdapat aspek lain yang memicu adanya konflik dalam komunitas nelayan, yaitu tentang keberadaan rumpon. Rumpon adalah alat bantu penangkapan nelayan, yang kemudian menimbulkan konflik, karena dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan. dimana akhirnya terdapat suatu kesenjangan yang kemudian menimbulkan konflik. Tidak hanya itu saja peraturan/kebijakan tentang pemasangan dan pemanfaatan yang tidak sesuai diterapkan oleh pemerintahan lokal menambah konflik semakin terbuka. Studi tentang bagaimana konflik rumpon serta kebijakan yang berlaku didalamnya, terutama yang terkait dengan aksi kolektif yang dilakukan nelayan belum banyak dilakukan. Oleh karena studi ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana aksi kolektif nelayan non rumpon serta aspek-aspek yang mempengaruhinya.

## 2.2 Kerangka Teoritik

Dalam studi mengenai aksi kolektif ini, digunakan teori tentang aksi kolektif yang dikemukakan oleh Charles Tilly. Teori ini digunakan karena Tilly mengungkapkan tentang aksi kolektif suatu kelompok, melihat suatu kejadian dan bagaimana pergerakannya. Menurut Charles Tilly (1978:7) *Collective action* adalah aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai kepentingan bersama. Pengertian *Collective action* paling tidak

menyangkut a) lebih dari satu orang, b) membuat claim pada status agen (atau corporate). Menurut Tilly (Olzak, 1989) menyatakan bahwa klaim tersebut meliputi petisi, peringatan dan perlawanan atau dukungan sebagai musuh pada pemerintah. Dari batasan definisi tersebut maka *collective action* berbeda dengan *social movements*. Menurut Tilly (Olzak, 1989) *Social movements Social movements are "a group of people identified by their attachment to some particular set of belief*. Secara konseptual definisi *collective action* secara normal tidak harus melibatkan keyakinan yang sama diantara aktor. Dalam kajian tersebut Tilly membagi menjadi 3 model *collective action* yaitu *pertama, competitive collective action*, adalah suatu bentuk aksi kolektif terjadi jika dua kelompok atau lebih saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu hal. *Kedua, reactive collective* yaitu aksi kolektif yang terjadi sebagai reaksi terhadap hak-haknya yang telah mapan dilanggar oleh pihak lain. Dan *ketiga, proactive collective action* merupakan suatu aksi kolektif yang ingin membentuk struktur baru yang belum pernah ada sebelumnya. Demonstrasi atau aksi protes merupakan salah satu bentuk dari aksi kolektif yang dilakukan masyarakat.

Aksi kolektif dalam penelitian ini terkait dengan aksi yang dilakukan oleh kelompok nelayan. Aksi kolektif yang dilakukan ini adalah aksi protes kelompok nelayan non rumpon. Aksi protes tersebut terutama terhadap keberadaan rumpon di perairan pesisir Puger, dimana hal tersebut terkait dengan kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Jember tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon. Aksi protes ini juga sangat terkait dengan konflik. Konflik antar nelayan di komunitas nelayan Puger tentang keberadaan rumpon akhirnya menimbulkan aksi kolektif yang berwujud aksi protes.

Penelitian tentang *collective action* akhir-akhir ini biasanya difokuskan pada kejadian, waktu, dan rangkaian atau runtutan peristiwa seperti perubahan rezim, kerusuhan, revolusi, protes dan pendirian organisasi gerakan sosial (Olzak, 1989). Analisis- analisisnya antara lain terkait dengan durasi waktu kejadian, banyaknya partisipan, serta adanya kekerasan. Dalam analisis aksi kolektif Tilly (1978:7) mengungkapkan bahwa ada 5 komponen yaitu *interest, organization, mobilization, opportunity* dan aksi kolektif itu sendiri.

Terdapat 5 komponen dalam aksi kolektif oleh Tilly yaitu pertama, *interests, interest* disini adalah isu, kepentingan dari kelompok. Ini merupakan hasil dari interaksi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu *Interests* yang dimaksud adalah *collective interests*. Didalam *interests* ini dibicarakan juga derajat konflik antara individu dan *collective*

*interests* sebagai sebuah variable afeksi dan kareakter dari aksi sosial. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tilly (1978:62): ” *We sholud deliberately treat the degree of conflict between individual and collective intersts as a variabel affecting the likelihood and character of collective action*”. Dalam penelitian ini aksi yang dilakukan oleh kelompok anti rumpon berkaitan dengan isu ekonomi. Isu ekonomi ini sangat penting sekali karena menyangkut dengan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga nelayan.

Kedua, organisasi, menurut Tilly (1978:7) menyatakan bahwa ” *The Organization which concerns us most is that aspect of a group’s structure which most directly affects its capacity to act on its interes*. Dalam organisasi ini dimana yang menjadi perhatian adalah berbagai aspek dalam struktur sebuah kelompok yang secara langsung berdampak pada kapasitas suatu tindakan dalam interesnya. Tilly (1978:62) menyatakan bahwa “*there are two elements: there are categories of people who share some characteristic and there are also networks of people who are liked to each other, directly or indirectly..*”. Terdapat dua elemen dalam organisasi ini yaitu pertama, kategori individu yang terlibat dengan berbagai karakteristiknya. Kedua, jaringan individu-individu yang saling terhubung satu dengan yang lain, baik secara langsung dan tidak langsung. Dalam organisasi ini dilihat bagaimana nelayan anti rumpon mengorganisasikan dirinya untuk menjadi suatu kelompok yang nantinya digunakan untuk mobilisasi. Proses pembentukan identitas kelompok nelayan anti rumpon dibentuk dalam tahap pengorganisasian ini. Setelah tahap pengorganisasian ini maka selanjutnya adalah **Mobilisasi**.

Mobilisasi merupakan suatu proses dimana sebuah kelompok memperoleh kontrol kolektif atas sumber daya yang dibutuhkan untuk aksi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tilly (1978:7) : ”*Mobilization is the proses by which a groups acquires collective control over the resources needed for action*”. Sumber daya tersebut seperti kekuatan pekerja/tenaga kerja, komoditi, senjata, tehnologi dan suara. Mobilisasi ini merupakan proses dimana sebuah kelompok bergerak dari kolektif individu yang pasif mengarah pada partisipasi aktif ke kehidupan publik. Hal ini seperti yang dinyatakan Tilly (1978:69): “*The word “mobilization” conveniently identifies the process by which a group goes from being a passive collection of individual to an active participant in public life*”. Dalam analisis mobilisasi ini hal yang diperhatikan adalah jalan atau cara bagaimana kelompok memperoleh sumber daya dan membuatnya ada untuk aksi kolektif. Cara tersebut terkait dengan akumulasi sumber daya dan peningkatan *collective claim* pada sumber daya (Tilly, 1978:73). Peningkatan *collective claim* ini



dilakukan dengan mengurangi persaingan klaim, merubah program aksi kolektif dan dengan merubah kepuasan partisipan. Dalam mobilisasi ini kelompok nelayan anti rumpon berusaha mengakumulasi aktor-aktor yang terlibat, serta sumber daya yang lain untuk digunakan dalam aksi kolektifnya nanti. Klaim-klaim bahwa mereka juga berhak mendapatkan bagian yang sama juga diakumulasi dalam tahap ini. Setelah komponen-komponen tersebut maka tahap selanjutnya akan mengarah pada *opportunity*.

*Opportunity* sebagai komponen keempat yang dikemukakan Tilly menitikberatkan pada hubungan antara sebuah kelompok dan lingkungan sosial yang ada disekelilingnya (Tilly, 1978:7). Dalam hal ini berkaitan dengan kesempatan kelompok berhubungan dengan pemerintah. Kesempatan itu adalah adanya peluang kelompok untuk melakukan aksi kolektifnya. Saat ini iklim penyampaian aspirasi terbuka lebar dalam ruang publik. Oleh karena itu nelayan anti rumpon mencoba melakukan aksi kolektifnya dengan bentuk protes atau demonstrasi kepada dinas perikanan dan peternakan setempat. Terdapat 3 komponen yang berhubungan dengan *opportunity* yaitu *power*, *repression/fasilitation*, and *opportunity/ threat*. *Opportunity* ini terkait dengan model mobilisasi. *Power* disini menunjuk pada kekuatan kelompok dan skala aksi yang dilakukan. Dalam *power* juga terdapat *political power*, hal ini jika berhubungan dengan pemerintah (Tilly, 1978:55). *Repression* ini terkait dengan banyaknya aksi yang dilakukan oleh kelompok untuk meningkatkan biaya pesaing dari aksi kolektif. Sedangkan *fasilitation* menunjuk pada adanya fasilitas untuk aksi, yang menyangkut dengan biaya atau sejenisnya. Dan komponen aksi sosial yang terakhir adalah *collective action*. *Collective action* ini mengandung individu-individu yang bergerak bersama-sama untuk mencapai keinginan bersama. Dari uraian mengenai komponen-komponen dalam aksi kolektif tersebut maka aksi kolektif ini merupakan hasil dari perubahan kombinasi *interests*, *organization*, *mobilization* dan *opportunity* (Tilly, 1978:55).

Pada dasarnya komponen-komponen yang diungkapkan Tilly tentang aksi kolektif tersebut didalamnya diuraikan bagaimana interaksi antar kelompok dan sebuah kelompok yang melakukan aksi kolektif, dimana aksi tersebut berkaitan dengan pemerintah. Jadi terdapat dua element dalam aksi tersebut yaitu kelompok dan pemerintah. Max Weber (Amenta & Michael P. Young, 1999) menyatakan bahwa *state as sets of political, military, judicial and bureaucratic organizations that exert political authority and coercive control over people living within the borders of well-defined territories*. Menurut Weber tersebut pemerintah merupakan seperangkat organisasi birokratik, politik, militer, judicial yang memegang tekanan otoritas politik dan

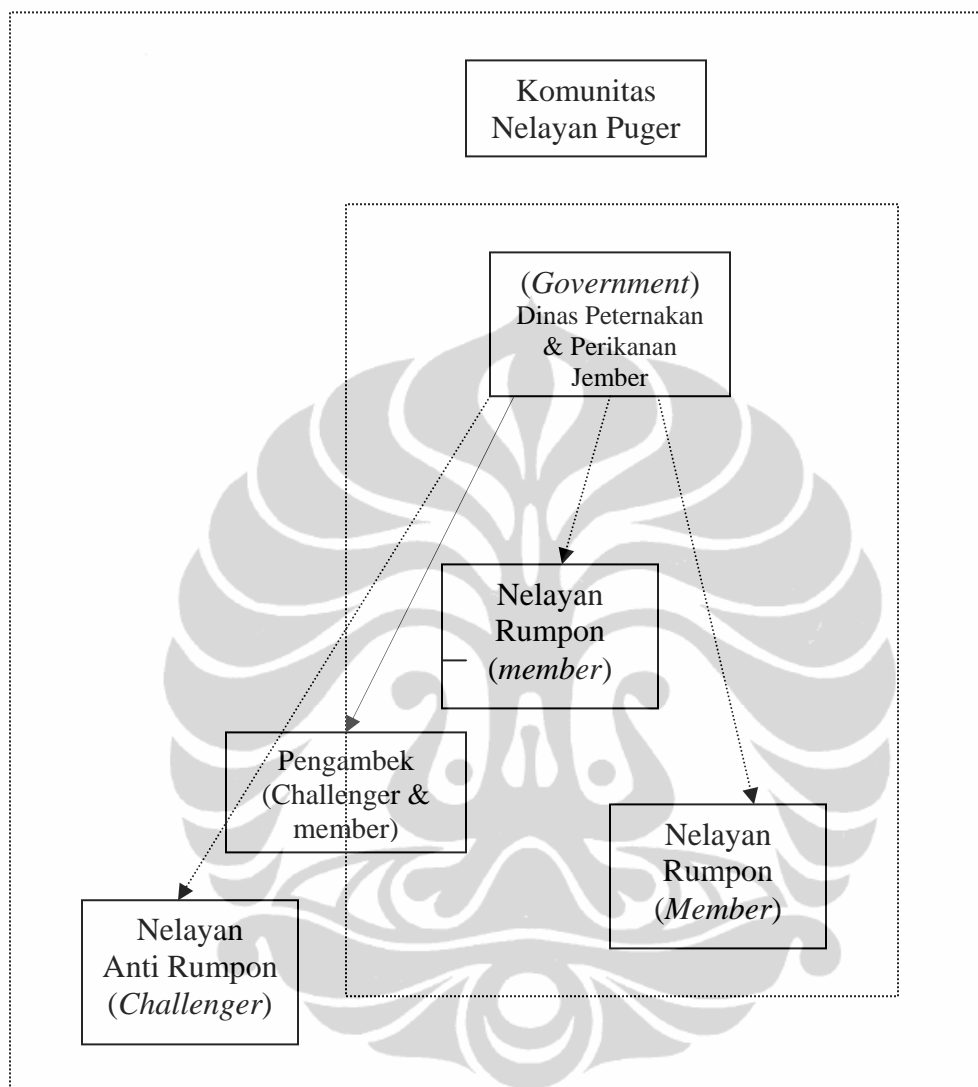
kontrol diatas masyarakat yang berada dilingkupnya. Pengertian ini sejalan dengan Tilly (1978:52) yang mengungkapkan bahwa *state/government* adalah sebuah organisasi dimana kontrol pemusatan yang penting berada ditangannya dan digunakan sebagai alat paksaan dengan masyarakat. *Government (local state)* dalam konflik ini adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Jember yang memegang kekuasaan. Kebijakan mengenai penggunaan rumpon sebagai alat tangkap bukan tidak mungkin diartikan sebagai salah satu cara untuk menggunakan kewenangannya kepada komunitas nelayan—dalam arti yang lebih naif.

Didalam komunitas nelayan Puger tersebut terdapat dua kelompok nelayan yang masing-masing berada dalam wilayah *members* dan *challengers*. *Members* dalam konflik ini adalah kelompok nelayan rumpon yang berada dalam lingkup *governments*. Artinya kelompok nelayan yang bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Jember. Sedangkan *challengers* dalam konflik ini adalah pihak nelayan yang anti rumpon. Ini merupakan kelompok nelayan yang menentang kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan Jember atas pemasangan dan pemanfaatan rumpon di perairan pesisir pantai Puger. Selain kedua kelompok tersebut ada aktor lain yang berada dalam lingkup *members* dan *challengers* yaitu pengambek. Pengambek yang berposisi sebagai *members* adalah pengambek yang memiliki rumpon dan terlibat dalam konflik dan aksi protes ini. Sedangkan pengambek yang berposisi sebagai *challengers* adalah pengambek yang tidak memiliki rumpon serta tidak terlibat dalam konflik dan aksi protes. Meskipun menurut Tilly keduanya (*members* dan *challengers*) merupakan *contender*<sup>8</sup> (pesaing) pemerintah namun tetap ada kelompok yang pro dan kontra pemerintah.

---

<sup>8</sup> *contender* (pesaing) menurut Tilly adalah kelompok yang dalam beberapa kurun waktu menerapkan penyatuan sumber dayanya untuk mempengaruhi pemerintah.

Berikut ini merupakan bentuk hubungan kelompok-kelompok tersebut dengan pemerintahan :



Gambar 2.1 Model hubungan kelompok dengan pemerintah

Sumber : Diadopsi dari Tilly (1978:53)

Untuk mempertajam dan memperkaya analisis tentang aksi kolektif dari Tilly ini digunakan juga teori konflik dari Lewis Coser. Teori ini digunakan karena aksi kolektif yang dilakukan oleh kelompok nelayan non rumpon berkaitan dengan konflik yang terjadi antara nelayan non rumpon dengan nelayan rumpon serta konflik antara nelayan non rumpon dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Jember. Menurut Coser konflik adalah perselisihan mengenai

nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi (Wagiyo, 2007). Dalam kajiannya tersebut Coser membahas antara lain tentang penyebab konflik serta isu dari kekerasan konflik,

Lewis Coser (Turner, 1998:172) dalam proposisi penyebab konflik menyatakan bahwa

- I. Subordinate members in a system of inequality are more likely to initiate conflict as they question the legitimacy of the existing distribution of scarce resource,*
- II. Subordinates are most likely to initiate conflict with super ordinates as their sense of relative deprivation and, hence injustice increases,*

Dalam *proposisi penyebab konflik* tersebut menyatakan bahwa *pertama*, anggota-anggota subordinat dalam sistem ketidaksetaraan lebih mungkin untuk memulai konflik karena mereka mempertanyakan legitimasi dari distribusi sumber daya langka yang ada. Hal ini disebabkan oleh a) sedikitnya *channel* untuk mengalihkan keluhan, dan b) rendahnya tingkat mobilitas untuk posisi yang istimewa. *Proposisi yang kedua* menyatakan bahwa anggota-anggota subordinat lebih suka untuk memulai konflik dengan anggota superordinat karena merasa adanya perampasan, oleh karena itu ketidakadilan meningkat. Konflik rumpon pada komunitas nelayan Puger berhubungan dengan ketersediaan sumber daya perikanan di perairan Puger. Ketika ada nelayan yang memasang rumpon dan hasilnya ternyata lebih banyak, maka kelompok nelayan yang tidak menggunakan rumpon mulai merasa adanya perampasan dan ketidakadilan.

Proposisi selanjutnya adalah tentang kekerasan dalam konflik. Dalam proposisi ini Coser membedakan tipe dasar dari konflik yaitu konflik yang realistik dan non realistik (Turner, 1998:173) berikut pernyataannya:

- I. When groups engage in conflict over realistic issues (obtains goals), they are more likely to seek compromises over the means to realize their interests, and hence, the less violent the conflict will be.*
- II. When groups engage in conflict over nonrealistic issues, the greater is the level of emotional arousal and involvement in the conflict, and hence, the more violent the conflict will be, especially when*
  - a. Conflict occurs over core values*
  - b. Conflict endures over time*
- III. When functional interdependence among social units is low, the less available are the institutional means for absorbing conflicts and tensions, and hence, the more violence the conflict will be.*

Coser menyatakan dalam beberapa proposisi, yaitu *proposisi 1*, saat kelompok terlibat dalam konflik atas isu-isu yang realistik (tujuan dapat diperoleh) mereka lebih cenderung mencari kompromi atas sarana untuk mewujudkan kepentingan mereka dan karenanya, semakin

sedikit konflik kekerasan yang akan terjadi. Konflik realistik ini bersifat kongkrit atau berupa materi seperti konflik sumber daya ekonomi atau wilayah. Dalam konflik realistik ini cenderung mencari kompromi dalam mencapai apa yang menjadi tujuannya. Hal ini berarti ada tujuan yang harus dicapai dari konflik yang sedang terjadi sehingga perkelahian atau kekerasan dapat diatasi dengan baik.

*Proposisi 2*, saat kelompok terlibat dalam konflik atas isu-isu nonrealistik, semakin besar tingkat gairah emosional dan keterlibatan dalam konflik, dan karenanya, semakin kekerasan konflik akan terjadi, terutama bila a, terjadi konflik atas nilai-nilai inti, b, konflik bertahan dari waktu ke waktu. Sedangkan pada konflik yang bersifat non realistik, lebih melibatkan dorongan emosional dalam konfliknya. Dalam konflik non realistik ini konflik lebih pada kebutuhan untuk melepaskan ketegangan-ketegangan (bersifat emosional) dan tidak berorientasi pada hasil pencapaian tertentu (Coser, 1956). Sehingga kekerasan atau perkelahian dalam konflik akan terjadi, terutama jika menyangkut nilai-nilai inti dan bertahan dari waktu ke waktu. Konflik non realistik ini seperti konflik antar agama, antar etnis, suku dan yang sifatnya ideologis. Konflik realistik dan non realistik dapat terjadi secara bersamaan dalam konflik yang sama. Dalam konflik rumpon komunitas nelayan Puger ini konflik disertai dengan kekerasan atau pengerusakan. Oleh karena itu bukan tidak mungkin kekerasan yang terjadi karena isu-isu yang realistik dan isu non realistik. Mengingat kedua kelompok nelayan tersebut memiliki latarbelakang yang beragam. Adanya kekerasan dalam konflik rumpon di komunitas nelayan Puger bukan tidak mungkin disebabkan karena rendahnya rasa saling ketergantungan secara fungsional antara unit-unit sosial. Selain itu karena kurang tersedianya sarana institusional untuk menyerap konflik, ketegangan sehingga kekerasan dalam konflik tersebut akan semakin tinggi. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam proposisi ketiganya tentang kekerasan dalam konflik.

## **2.3 Pengertian Konsep**

### **2.3.1 Komunitas Nelayan**

Pengertian komunitas sangat beragam, menurut Gunnar Almgren (Borgatta & Rhonda, 2000) komunitas tidak hanya terbatas pada lingkup desa atau kota kecil dengan karakteristik *gemeinschaft* atau *gesellschaft*. Di dalam komunitas juga terdapat keanggotaan, pengaruh, integrasi dan pemenuhan kebutuhan (David, dalam Borgatta & Rhonda, 2000). Selo soemardjan (Soekanto, 1982) menyatakan bahwa komunitas juga menunjuk pada suatu masyarakat setempat

di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Sekelompok nelayan merupakan suatu komunitas yang berada di wilayah pesisir. Nelayan menurut ensiklopedi Indonesia (dalam Meirina, 2005) adalah "orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti para penebar dan penarik jaring), maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesian kapal, juru masak kapal penangkap ikan) sebagai mata pencaharian". Inti dari batasan ini adalah nelayan merupakan pekerjaan yang dilakukan di laut. Menurut Kamus Bahasa Indonesia nelayan adalah orang yang beraktivitas dalam penangkapan ikan. Sedangkan menurut Departemen Pertanian Direktorat Jendral Perikanan, nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa nelayan dipandang sebagai kelompok kerja yang tempat bekerjanya di air, yaitu sungai, danau dan laut.

Komunitas nelayan (*fisher society*) menurut Mubryarto (dalam Meirina, 2005:12) merupakan kelompok masyarakat yang bermata pencaharian atau mengantungkan nafkah hidupnya dari proses penangkapan ikan di laut. Komunitas nelayan ini mengandalkan laut untuk keberlangsungan hidupnya. Karakteristik komunitas nelayan berbeda dengan komunitas yang lain. Komunitas nelayan menghadapi sumber daya yang masih bersifat *open acces*. Dengan karakteristik tersebut nelayan harus berpindah-pindah untuk menangkap ikan agar memperoleh hasil yang maksimal. Nelayan dapat dibedakan menjadi nelayan besar (*large scale fisherman*) dan nelayan kecil (*small scale fisherman*) (Satria, 2009). Nelayan berskala besar dicirikan oleh teknologi penangkapan yang berorientasi pada keuntungan. Sedangkan perikanan berskala kecil lebih beroperasi di daerah kecil yang bertumpung tindh dengan kegiatan budidaya dan bersifat padat karya. Teknologi yang digunakan masih sederhana dan lebih untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan menurut Satria (2009) mengolongkan nelayan menjadi 4 tinngkatan, yang dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi pasar dan karakteristik hubungan produksi. *Pertama, peseant fisher* (nelayan tradisional) merupakan nelayan yang biasanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsistensi). Umumnya mereka masih menggunakan alat tangkap tradisional dayung atau sampan tidak bermotor dan umumnya masih menggunakan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama. *Kedua, post peasant fisher*, yaitu

nelayan yang dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan lebih maju seperti motor temple atau kapal motor. *Ketiga, commercial fisher* yaitu nekayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah membesar yang dicirikan dengan besarnya jumlah tenaga kerja dengan status yang berbeda dari buruh hingga manajemen. Tehnologi yang digunakan sudah lebih modern dan membutuhkan keahlian tersendiri, baik dalam pengorganisasian kapal maupun alat tangkap. Dan *keempat, industrial fisher*, ciri nelayan ini adalah (a) diorganisir dengan cara-cara yang mirip perusahaan agroindustri dinegara-negar maju, (b) secara relative lebih padat modal, (c) memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak kapal, dan (d) menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor.

Ditinjau dari stratifikasi sosial masyarakat nelayan yang dikemukakan oleh Kusnadi (2002), nelayan ditinjau dari tiga sudut pandang. *Pertama*, dari segi penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. *Kedua*, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan, disebut sebagai nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relative banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya. Dan *ketiga*, dilihat dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Masyhuri (1996) menyatakan bahwa, baik secara horizontal maupun vertikal susunan masyarakat nelayan sangat dipengaruhi oleh organisasi penangkapan ikan dan tingkat pendapatan yang dicapai. Menurutnya jika pendapatan semakin kecil semakin tidak strategis peranan dalam organisasi penangkapan ikan, maka semakin rendah pula posisi dalam masyarakat. Posisi Juragan laut dalam konteks ini menempati posisi yang lebih tinggi daripada nelayan pandega.

Uraian diatas memberikan gambaran tentang begitu beragamnya pengertian nelayan sebagai suatu komunitas. Maka dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa komunitas nelayan merupakan sekelompok masyarakat yang mengantungkan nafkah hidupnya dari proses

penangkapan ikan di laut—ketersediaan sumber daya laut, dimana didalam komunitas itu terdapat stratifikasi terutama berdasarkan pemilikan alat tangkap (teknologi alat tangkap), orientasi pasar serta karakteristik hubungan produksi.

### 2.3.2 Alat tangkap rumpon

Berbagai jenis ikan yang hidup diperairan yang lingkungannya berbeda-beda itu menimbulkan cara penangkapan termasuk penggunaan alat tangkap yang berbeda. Rumpon atau *Fish Agregating Device* merupakan adalah salah satu alat tangkap yang berfungsi sebagai pengumpul kawanan ikan. Rumpon atau tendak (Jawa), Onjen (madura), rabo (Sumbar), Ujan dan Tuasan (Sumatera Timur, Sumatera Utara) merupakan suatu bangunan (benda) menyerupai pepohonan yang dipasang disuatu tempat ditengah laut (Subani & Barus, 1989). Pada prinsipnya rumpon ini terdiri dari Pelampung, tali panjang dan atraktor (pematik) dan pemberat.

Sebagai upaya untuk meningkatkan hasil tangkapan penggunaan rumpon menjadi salah satu alternatif pilihan yang menjanjikan bagi nelayan. Rumpon ini juga bisa disebut sebagai sebuah daerah atau tempat penangkapan ikan. Dimana nelayan hanya akan menangkap ikan yang ada disekitar rumpon tersebut. Ini berbeda dengan paradigma penangkapan ikan yang selama ini digunakan oleh nelayan yaitu nelayan berusaha mencari ikan dengan mengejar ikan. Sedangkan di rumpon nelayan hanya akan menangkap ikan di sekitar dimana rumpon tersebut di tanam. rumpon ini seperti rumah untuk ikan, dimana ikan berkembang biak di rumpon tersebut. Direktorat Jenderal Perikanan (Zulkhasyni, 2009) menyatakan bahwa terdapat beberapa keuntungan dalam penggunaan rumpon yakni: memudahkan gerombolan ikan, biaya eksploitasi dapat dikurangi dan dapat dimanfaatkan oleh nelayan kecil.

Meskipun terdapat banyak manfaat dari rumpon namun ada indikasi tentang adanya *overfishing* karena pemasangan rumpon ini<sup>9</sup>. Hal ini disebabkan karena rumpon dapat menarik

---

<sup>9</sup> Untuk pemasangan rumpon perairan dalam, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan yaitu tidak boleh

- a. Menganggu alur pelayaran,
- b. Dipasang dengan jarak pemasangan antara rumpon satu dengan rumpon lainnya kurang dari 10 mil laut,
- c. Menganggu pergerakan ikan di perairan laut,
- d. Dipasang pada kedalaman perairan kurang dari 200 meter,
- e. Dipasang dengan jarak kurang dari 12 mil diukur dari garais pasang surut terendah pada waktu air surut dari setiap pulau,
- f. Dipasang dengan cara pemasangan yang mengakibatkan efek pagar (zig-zag) yang mengancam kelestarian jenis ikan pelagis.



segala jenis ikan dan berbagai macam ukuran ikan. Selain itu seperti yang telah dinyatakan dalam fungsi rumpon sebagai alat bantu ikan serta manfaatnya, maka kemungkinan untuk *overfishing* sangat besar. *Overfishing* ini akan semakin tinggi jika diperairan tersebut terdapat perikanan komersil. Giuliani, et al (2004) menyatakan bahwa Pada tahun 2002, sebanyak 72 % dari ikan laut di dunia sudah dipanen lebih cepat daripada tingkat reproduksinya. Menurutnya kegiatan penangkapan sudah memberikan dampak negatif pada ekosistem laut. Hal ini dikarenakan adanya penangkapan ikan komersial yang sangat luas. Kondisi *overfishing* tersebut disebabkan oleh faktor teknologi, *open access* dan *over-capacity* serta "*bycatch*"<sup>10</sup>.

Berdasarkan kementapan pemasangan Rumpon (Zulkhasyini, 2009), terdapat dua tipe yaitu

1. Rumpon menetap (memiliki jangkar/pemberat berukuran besar) sehingga tidak dapat dipindahkan dan dipasang diperairan dalam dengan kondisi gelombang besar dan arus kuat, guna memikat/mengumpulkan jenis ikan pelagis besar.
2. Rumpon yang dapat dipindahkan (terbuat dari bahan yang relatif ringan) sehingga memungkinkan untuk diangkat atau dipindahkan guna memikat atau mengumpulkan jenis-jenis ikan pelagis kecil.

Terdapat beberapa alat tangkap digunakan disekitar rumpon, antara lain alat tangkap Rawai tuna atau tuna long line, Huhate (pole and Line), handline, pukot cincin, jaring insang<sup>11</sup>. Tentang sejarah rumpon di Indonesia, masih belum tergambar secara jelas kapan rumpon

---

Dalam pemanfaatan rumpon perairan dalam ini harus ada izin dari pemerintah pusat dengan segala ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan Menteri Pertanian nomor: 51/Kpts/IK.250/1/97 tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon.

<sup>10</sup> "*Over capacity* " adalah kehadiran terlalu banyak kapal-kapal dalam rangka peningkatan jumlah perikanan. Stok ikan secara umum dianggap milik umum, terbuka untuk eksploitasi oleh siapapun dengan perahu dan perlengkapan selama mereka gunakan di luar negara dengan batas diluar 200 Mile Zona Ekonomi Eksklusif. "*Bycatch*" mengacu pada penangkapan ikan yang bukan target penangkapan. Jadi penangkapan ikan *Bycatch* ini adalah segala jenis ikan yang ditangkap pada waktu ditangkap, ikan yang bukan target akan dibuang dan sebagian besar tidak dapat bertahan hidup. *Open access* berarti kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya laut terbuka bagi semua orang. Di dalam sumber daya akses terbuka, tidak ada pengaturan tentang apa, kapan, dimana, siapa dan bagaimana sumberdaya alam dimanfaatkan, serta bagaimana terjadinya persaingan bebas/*free for all* (Satria, 2009). Bailey (1986) menyatakan bahwa model akses terbuka (*open access*) telah terbukti baik secara biologis dan sosial tidak bisa dijalankan karena meningkatnya tekanan pada sumber daya yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, inovasi teknologi dan peluang pemasaran baru.

<sup>11</sup> Rawai Tuna adalah merupakan rangkaian sejumlah pancing yang dioperasikan sekaligus. Huhate yang dipakai adalah khusus untuk menangkap ikan cakalang, sering disebut juga pancing cakalang, serta dioperasikan sepanjang hari pada saat terdapat gerombolan ikan di sekitar rumpon. Handline dioperasikan pada siang hari, konstruksi alat ini sangat sederhana, pada satu tali pancing utama dirangkaikan 2-mata pancing secara vertical, dalam pengoperasian alat ini rumpon sebagai alat pengumpul ikan. Pukot cincin (purse seine) adalah jaring yang dibagian bawahnya dipasang sejumlah cincin atau gelang besi. Jaring insang (gillnet) adalah jaring yang berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran mata yang sama di sepanjang jarring. [www.uwityangyoyo.file.wordpress.com](http://www.uwityangyoyo.file.wordpress.com)

tersebut masuk dan diperkenalkan di Indonesia sebagai alat tangkap. Namun pemanfaatannya telah dilakukan oleh nelayan-nelayan yang ada di Indonesia. Seperti nelayan yang ada di daerah Sulawesi selatan yang dikenal dengan "rompong mandar". Rumpon di daerah Sulawesi selatan (mandar) diperkenalkan lebih dari 5 dekade yang lalu. Struktur rumpon tersebut digunakan oleh nelayan ikan cakalang pada teluk Bone. Rumpon yang mirip dengan rakit, dalam bahasa Mandar disebut *ropo* atau *roppong* atau dalam bahasa Bugis-Makassar disebut *rumpong* (Alimuddin, 2008) Dalam publikasi PBB, FAO menyebutkan bahwa teknologi rumpon diduga pertama kali dikembangkan oleh nelayan mandar. Dari rumpon yang dikembangkan oleh nelayan Mandar inilah teknologi rumpon mulai menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Seperti di Sorong, Fak-fak, Maluku Utara, Teluk Tomini, Laut Sulawesi, dan Sulawesi Tenggara berkembang dengan alat tangkap pancing *huhate* (pole and line) dan pancing ulur (handline) rumpon jenis ini biasanya dipasang di perairan laut dalam bentuk menangkap ikan pelagis besar (Tadjuddah, 2009).

Penggunaan teknologi rumpon laut dalam baru dikembangkan sekitar tahun 1978-an untuk menangkap ikan pelagis besar<sup>12</sup>. Rumpon laut dalam ini dikenal dengan "payos" yang dikembangkan oleh orang Philipina (Subani & Barus, 1989). Di Philipina pengembangan "Payos" pada tahun 1979-an sudah mencapai 600 buah payos. "Payos" ini hanya lebih ditekankan pada ikan Tuna, Cakalang dan sejenisnya yang memiliki nilai tinggi dalam ekspor. Sedangkan untuk daya tahan rumpon yang di pasang pada laut sangat bervariasi tergantung dari jenis material serta kondisi dan kedalaman perairan. Penggunaan rumpon ini dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya operasi penangkapan ikan selain itu ikan-ikan yang ada di sekitar rumpon memiliki kualitas untuk peluang ekspor atau berdaya jual yang tinggi dan cepat, seperti ikan Tuna. Rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan di perairan laut ini digunakan sebagai sebuah rumah ikan dimana ditempat tersebut ikan-ikan dapat berlindung serta bertelur dan bahwa untuk mencari makan karena di tempat tersebut juga terdapat banyak plankton.

---

<sup>12</sup> Jenis ikan pelagis (ikan permukaan) ini antara lain ikan, ikan layang, ikan kembung, ikan tuna dan ikan cakalang